



90% Warga Kota Terdaftar BPJS Kesehatan

Triwulan Pertama Klaim Jamkesda 20%

YOGYAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta mengalokasikan Rp20 miliar untuk menanggung warga dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2017. Namun paada triwulan pertama ini klaim asuransi tersebut baru mencapai 20%.

Rendahnya serapan klaim Jamkesda diyakini karena mayoritas warga Kota Yogyakarta telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Klaim memang diberi kelonggaran hingga akhir tahun. Tapi kemungkinan karena kepesertaan BPJS yang sudah mendekati 90%," kata Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Umi Nur Chariyati, kemarin.

Diakuinya, selama ini yang kerap mengklaim Jamkesda adalah rumah sakit swasta. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, klaim Jamkesda dari rumah sakit cenderung menumpuk di akhir tahun. Meski demikian, dia menjamin hal itu tidak mengganggu pelaporan penggunaan

"Klaim memang diberi kelonggaran hingga akhir tahun. Tapi kemungkinan karena kepesertaan BPJS yang sudah mendekati 90%."

UMI NUR CHARIYATI
Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

anggaran Jamkesda.

Terkait kepesertaan warga dalam BPJS, Pemkot Yogyakarta menanggung premi bulanan 11.186 keluarga peserta ban-

tuhan iuran (PBI) BPJS. Belasan ribu kepala keluarga tersebut terdaftar sebagai penerima Kartu Menuju Sehat (KMS).

Untuk realisasi pembayaran PBI BPJS Kesehatan sampai triwulan pertama 2017 tercatat sekitar Rp688 juta. Masih ada sekitar 3.000 penerima KMS yang belum terdaftar dalam PBI BPJS.

"Tengah kami upayakan, tapi harus valid masuk pemegang KMS," imbuhnya.

Program Jamkesda Kota Yogyakarta yang merupakan program bagi warga yang belum terdaftar dalam JKN akan berakhir pada 2019. Pemerintah pusat menargetkan tahun 2019 seluruh warga menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan agar semua program jaminan kesehatan dapat terintegrasi.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Budi Utomo berharap seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses haknya memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Kebijakan yang digulirkan pemerintah kota diharapkan lebih memprioritaskan warga yang belum bisa mengakses, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005